Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 43-50
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23284163

Pemberdayaan CSR dan Ekonomi Biru: Bukti dari UMKM Pesisir di Lampung

CSR Empowerment and the Blue Economy: Evidence from Coastal MSMEs in Lampung, Indonesia

Muhammad Yusuf Bahtiar[1]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email korespondesi: myusufbahtiar@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengintegrasikan perdebatan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberdayaan UMKM pesisir, dan ekonomi biru dalam konteks spesifik di Lampung, Indonesia. Penelitian ini menguji bagaimana CSR dapat memperkuat UMKM pengolahan hasil laut dan mendukung pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Tinjauan literatur kualitatif dilakukan melalui analisis konten tematik dari artikel jurnal yang ditinjau sejawat, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi mengenai CSR, UMKM, ekonomi biru, dan masyarakat pesisir Lampung. Sintesis menunjukkan bahwa CSR yang produktif meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan keterampilan, teknologi produksi, dukungan legalitas, sertifikasi, promosi merek, dan akses pasar. Integrasi ekonomi biru mengarahkan pemberdayaan pada pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, diversifikasi produk, dan tanggung jawab lingkungan. Model pemberdayaan ekonomi biru berbasis CSR yang diusulkan memandu perusahaan, pemerintah daerah, dan fasilitator masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang membangun daya saing tanpa melemahkan ekosistem pesisir.
Kata kunci: ekonomi biru; masyarakat pesisir; tanggung jawab sosial perusahaan; Lampung; UMKM

Abstract

This study integrates debates on corporate social responsibility (CSR), coastal micro, small, and medium enterprise (MSME) empowerment, and the blue economy within the specific context of Lampung, Indonesia. It examines how CSR can strengthen seafood-processing MSMEs and support sustainable coastal development. A qualitative literature review was conducted using thematic content analysis of peer-reviewed journal articles, policy documents, and official publications concerning CSR, MSMEs, the blue economy, and coastal communities in Lampung. The synthesis indicates that productive CSR initiatives enhance MSME capacity through skills training, production technology, business legality support, certification, brand promotion, and market access. Integrating blue economy principles directs empowerment efforts toward waste reduction, resource efficiency, product diversification, and environmental responsibility. The proposed CSR-based blue economy empowerment model provides guidance for companies, local governments, and community facilitators in designing empowerment programs that strengthen competitiveness without compromising coastal ecosystems.
Keywords: *blue economy; coastal communities; corporate social responsibility; Lampung; micro, small, and medium enterprises (MSMEs).*

Article Info
Received date: 22 September 2026 Revised date: 30 September 2026 Accepted date: 07 October 2026

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir merupakan ruang ekonomi yang produktif karena mendukung perikanan, pengolahan hasil laut, perdagangan, pariwisata bahari, dan mata pencaharian masyarakat. Dalam ekonomi berkembang, kawasan ini juga berfungsi sebagai sistem sosial-ekologis di mana perolehan pendapatan bergantung pada kondisi sumber daya laut. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru relevan karena menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem laut (Lee et al., 2020). Choudhary et al. (2021) juga berpendapat bahwa ekonomi biru dapat mengubah sumber daya laut menjadi industri berkelanjutan melalui inovasi dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Tantangan praktisnya adalah pertumbuhan ekonomi pesisir di tingkat masyarakat seringkali masih lemah. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pesisir yang menciptakan nilai dari

produk perikanan, namun sering beroperasi dengan modal terbatas, teknologi sederhana, kemasan yang lemah, akses pasar yang sempit, dan pengelolaan limbah yang tidak memadai. Kendala-kendala ini menurunkan produktivitas dan melemahkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengambil nilai yang lebih besar dari sumber daya laut. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi biru harus bergerak melampaui pembangunan kelautan tingkat makro dan menjangkau pelaku usaha kecil yang mengolah hasil laut dan bergantung pada ekosistem lokal.

Lampung memberikan contoh kasus yang relevan untuk diskusi ini. Pulau Pasaran di Bandar Lampung dikenal sebagai klaster pengolahan ikan asin dan telah menjadi basis ekonomi lokal bagi masyarakat pesisir. Zaini et al. (2023) menunjukkan bahwa klaster ini dapat diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, akses teknologi, standardisasi, dukungan modal, pengemasan, dan jaringan pemasaran. Rosdyanti et al. (2025) lebih lanjut mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas UMKM ikan asin di Pulau Pasaran. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM pesisir membutuhkan pengembangan kapasitas bisnis maupun keberlanjutan berbasis ekosistem.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda pemberdayaan ini. CSR tidak lagi terbatas pada amal atau donasi jangka pendek. CSR dapat menciptakan nilai sosial, memperkuat hubungan pemangku kepentingan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan ketika dirancang sebagai program pengembangan kapasitas (Aguinis & Glavas, 2012). Pada masyarakat pesisir, CSR dapat menyediakan pelatihan, pendampingan bisnis, peralatan produksi, dukungan kelembagaan, bantuan legalitas produk, sertifikasi, dan akses pasar. Bentuk-bentuk dukungan ini secara langsung mengatasi kendala umum yang dihadapi oleh UMKM pengolahan hasil laut.

Penelitian sebelumnya telah membahas CSR, pemberdayaan pesisir, pengembangan UMKM, dan ekonomi biru secara terpisah. Namun, studi yang mengintegrasikan CSR sebagai instrumen pemberdayaan produktif dengan prinsip ekonomi biru dalam konteks spesifik UMKM pengolahan hasil laut di Lampung masih terbatas. Kesenjangan ini penting karena UMKM pesisir membutuhkan dukungan yang meningkatkan pendapatan dan daya saing sekaligus melindungi basis sumber daya yang menjadi sandaran bisnis mereka. Engen et al. (2024) menekankan bahwa tujuan dan indikator keberlanjutan pesisir perlu diciptakan bersama dengan pemangku kepentingan agar kebijakan dan program mencerminkan kebutuhan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CSR dalam memberdayakan UMKM pengolahan hasil laut berdasarkan prinsip ekonomi biru pada masyarakat pesisir Lampung. Artikel ini berkontribusi dengan mengusulkan model pemberdayaan ekonomi biru berbasis CSR yang menghubungkan CSR produktif, peningkatan kapasitas UMKM, legalitas dan akses pasar, tanggung jawab lingkungan, serta ketahanan ekonomi pesisir. Model ini diharapkan dapat membantu perusahaan, pemerintah daerah, dan fasilitator masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang praktis, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur kualitatif. Metode ini tepat karena penelitian bertujuan untuk mensintesis pengetahuan yang ada mengenai CSR, pemberdayaan UMKM, ekonomi biru, dan masyarakat pesisir di Lampung. Penelitian tinjauan literatur membantu akademisi memetakan perkembangan konseptual, mengidentifikasi kesenjangan, dan membangun argumen terstruktur dari sumber-sumber yang dipublikasikan (Snyder, 2019). Tinjauan ini dirancang sebagai tinjauan naratif terstruktur, bukan meta-analisis statistik, karena literatur yang tersedia mencakup studi konseptual, studi berbasis kasus, dokumen kebijakan, dan temuan kualitatif.

Data terdiri dari sumber-sumber sekunder, termasuk artikel jurnal yang ditinjau sejawat, prosiding konferensi, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Pencarian berfokus pada empat klaster kata kunci: corporate social responsibility, CSR masyarakat pesisir, pemberdayaan UMKM, UMKM pengolahan hasil laut, ekonomi biru, masyarakat pesisir Lampung, Pulau Pasaran, dan pengolahan ikan asin. Pencarian dilakukan melalui Google Scholar, Crossref, ScienceDirect, SpringerLink, SINTA, Garuda, dan situs web jurnal resmi.

Kriteria inklusi adalah relevansi dengan CSR, pemberdayaan UMKM, ekonomi biru, pengolahan hasil laut, atau masyarakat pesisir Lampung; identitas bibliografi yang jelas; dan kontribusi terhadap argumen konseptual atau kontekstual penelitian. Sumber-sumber dieksklusi jika tidak terkait dengan pemberdayaan ekonomi pesisir, tidak memiliki informasi kepenulisan atau publikasi yang dapat diidentifikasi, atau tidak berkontribusi pada kategori analitis penelitian. Referensi diprioritaskan dari publikasi terbaru, sementara beberapa karya fundamental dipertahankan untuk mendukung konsep CSR dan analisis kualitatif.

Data dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif. Setiap sumber dibaca, diberi kode, dan dikelompokkan ke dalam empat tema: CSR sebagai instrumen pemberdayaan produktif, kendala kapasitas UMKM, prinsip ekonomi biru, dan konteks pesisir Lampung. Analisis konten berguna untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antar dokumen (Elo & Kyngäs, 2008). Analisis tematik juga digunakan untuk menghubungkan temuan lintas sumber dan memperkuat keterpercayaan sintesis (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Protokol Tinjauan Literatur

Elemen Protokol	Keterangan / Deskripsi
Desain penelitian	Tinjauan literatur kualitatif terstruktur dengan analisis konten tematik.
Basis data utama	Google Scholar, Crossref, ScienceDirect, SpringerLink, SINTA, Garuda, dan situs web jurnal resmi.
Kata kunci utama	CSR, CSR masyarakat pesisir, pemberdayaan UMKM, UMKM pengolahan hasil laut, ekonomi biru, masyarakat pesisir Lampung, Pulau Pasaran, pengolahan ikan asin.
Kriteria inklusi	Sumber yang relevan dengan CSR, UMKM, ekonomi biru, pengolahan hasil laut, dan masyarakat pesisir Lampung dengan informasi bibliografi yang jelas.
Tema analisis	CSR produktif, kapasitas UMKM, legalitas dan akses pasar, praktik ekonomi biru, ketahanan ekonomi pesisir.

UMKM Pengolahan Hasil Laut Lampung sebagai Pelaku Ekonomi Pesisir

Literatur menunjukkan bahwa UMKM pengolahan hasil laut di Lampung memiliki nilai ekonomi strategis karena mereka mengubah produk perikanan menjadi barang bernilai lebih tinggi. Pulau Pasaran adalah contoh utama. Kawasan ini telah berkembang sebagai klaster pengolahan ikan asin dan mendukung pendapatan rumah tangga, perdagangan lokal, dan lapangan kerja pesisir. Zaini et al. (2023) berargumen bahwa pengembangan klaster di Pulau Pasaran membutuhkan peningkatan kualitas produksi, teknologi, modal, pengemasan, standardisasi, dan jaringan pemasaran. Temuan ini

menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya eksistensi bisnis, tetapi juga kemampuan UMKM untuk bergerak menuju produktivitas dan daya saing yang lebih baik.

Kapasitas sumber daya manusia adalah masalah sentral lainnya. Rosdyanti et al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi mempengaruhi produktivitas UMKM ikan asin di Pulau Pasaran. Keterampilan teknis, kemampuan manajerial, penggunaan teknologi, dan kontrol kualitas sangat dibutuhkan agar UMKM dapat memenuhi persyaratan pasar. Tanpa kompetensi tersebut, UMKM dapat tetap terjebak dalam produksi bernilai rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga, pasokan musiman, dan persaingan dari produk yang dikemas lebih baik.

Sektor pengolahan hasil laut yang lebih luas di Bandar Lampung juga menunjukkan potensi diversifikasi produk. Witoko et al. (2026) menjelaskan bahwa usaha ikan lele asap membutuhkan analisis kelayakan dan strategi pengembangan yang mempertimbangkan kapasitas produksi, peluang pasar, dan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya perlu mempertahankan produk yang sudah ada, seperti ikan asin, tetapi juga mendorong inovasi produk, peningkatan kualitas, dan penetrasi pasar yang lebih luas.

CSR sebagai Instrumen Pemberdayaan Produktif

CSR dapat membantu UMKM pesisir ketika perusahaan merancangnya sebagai program pemberdayaan yang produktif. Konsep CSR klasik menekankan tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi (Carroll, 1991). Namun, praktik CSR saat ini semakin memandang tanggung jawab sosial sebagai aktivitas strategis yang dapat menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan pemangku kepentingan (Aguinis & Glavas, 2012). Dalam konteks UMKM pesisir, hal ini berarti CSR tidak boleh berhenti pada donasi. CSR perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mereka dapat mengelola produksi, legalitas, promosi merek, dan akses pasar secara mandiri.

Mareta et al. (2024) menunjukkan bahwa CSR dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir bila dihubungkan dengan pembangunan inklusif. Mukmin dan Krisdyatmiko (2021) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan pesisir berbasis CSR membutuhkan partisipasi masyarakat dan pengembangan kapasitas. Temuan-temuan ini mendukung argumen bahwa CSR harus direncanakan sebagai proses pemberdayaan tahun jamak. Pendekatan amal jangka pendek mungkin menghasilkan bantuan langsung, namun jarang menyelesaikan masalah struktural seperti rendahnya keterampilan, terbatasnya teknologi, lemahnya legalitas usaha, dan minimnya jaringan pasar.

Model kemitraan penting untuk implementasi CSR. Rahmawati dan Apip (2022) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir melalui CSR bekerja lebih baik ketika perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung. Untuk UMKM pengolahan hasil laut di Lampung, kemitraan semacam itu dapat menghubungkan sumber daya perusahaan dengan program pemerintah, keahlian akademis, dan pengetahuan masyarakat. Hasilnya adalah program yang lebih tepat sasaran yang memperkuat produksi, legalitas, akses pasar, dan praktik lingkungan.

Integrasi Ekonomi Biru dalam Pemberdayaan UMKM

Ekonomi biru memperluas pemberdayaan UMKM melampaui pertumbuhan pendapatan. Pendekatan ini mempertanyakan apakah kegiatan ekonomi juga melindungi ekosistem laut dan pesisir. Lee et al. (2020) menghubungkan ekonomi biru dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sementara Choudhary et al. (2021) menekankan inovasi dan tata kelola yang bertanggung jawab di industri kelautan. Bagi UMKM pengolahan hasil laut, ini berarti menggunakan bahan baku secara efisien, mengurangi limbah produksi, meningkatkan sanitasi, mengadopsi teknologi tepat guna, dan menciptakan produk bernilai lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia.

Integrasi ekonomi biru juga membutuhkan pembiayaan dan dukungan kelembagaan. Shiiba et al. (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan biru dapat mendukung pelestarian laut dan pembangunan secara bersamaan. CSR dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pembiayaan sosial untuk UMKM pesisir, terutama ketika mendukung peralatan, pelatihan pengelolaan limbah, kemasan ramah

lingkungan, inovasi produk, dan pemasaran digital. Pendekatan ini dapat membuat CSR lebih konsisten dengan tujuan keberlanjutan dan tidak terlalu bergantung pada bantuan sekali jalan.

Perspektif sosial-ekologis diperlukan karena usaha pengolahan hasil laut bergantung pada kualitas dan ketersediaan sumber daya perikanan. Elegbede et al. (2025) menekankan bahwa skema keberlanjutan hasil laut harus dipahami melalui interaksi antara aktor, institusi, pasar, dan ekosistem. Saparuddin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tanggung jawab keberlanjutan pesisir berkaitan dengan pengetahuan, sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis CSR harus mencakup literasi lingkungan dan perubahan perilaku, bukan hanya pelatihan teknis bisnis.

Model Pemberdayaan Ekonomi Biru Berbasis CSR

Tabel 2. Sintesis Temuan Utama

Aspek	Temuan Utama	Implikasi untuk Program CSR
Profil UMKM Pesisir	Lampung memiliki klaster pengolahan hasil laut, khususnya pengolahan ikan asin di Pulau Pasaran.	CSR harus menargetkan klaster yang ada untuk meningkatkan kualitas produksi, pengemasan, dan pemasaran.
Kapasitas SDM	Produktivitas UMKM bergantung pada kompetensi teknis, manajerial, dan teknologi.	CSR harus memprioritaskan pelatihan, pendampingan, dan bantuan bisnis berkelanjutan.
Pasar dan Legalitas	Banyak UMKM membutuhkan branding yang lebih kuat, sertifikasi produk, legalitas usaha, dan akses distribusi.	CSR harus memfasilitasi perizinan, sertifikasi, desain kemasan, pemasaran digital, dan hubungan dengan pembeli.
Ekonomi Biru	Pengolahan hasil laut harus mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan melindungi ekosistem pesisir.	CSR harus mencakup pengelolaan limbah, teknologi tepat guna, efisiensi sumber daya, dan literasi lingkungan.
Kemitraan	Pemberdayaan lebih efektif bila perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan fasilitator berkolaborasi.	CSR harus menggunakan model kemitraan dengan peran yang jelas, indikator pemantauan, dan strategi keluar (exit strategy).

Sintesis ini menghasilkan model pemberdayaan ekonomi biru berbasis CSR. Model ini memiliki lima tahapan yang saling terhubung: CSR produktif, peningkatan kapasitas UMKM, legalitas dan akses pasar, integrasi ekonomi biru, dan ketahanan ekonomi pesisir. CSR produktif memberikan titik masuk karena mentransfer sumber daya, pengetahuan, dan jaringan ke UMKM. Peningkatan kapasitas kemudian memperkuat keterampilan, penggunaan teknologi, kontrol kualitas, pembukuan, dan manajemen bisnis. Legalitas dan akses pasar membantu UMKM beralih dari produksi informal ke pasar yang lebih kompetitif.

Integrasi ekonomi biru menjadi elemen pembeda model ini. Hal ini memastikan bahwa pemberdayaan tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, dan mendorong produksi yang bertanggung jawab. Tahap akhir adalah ketahanan ekonomi pesisir. Tahap ini mencerminkan hasil yang diharapkan dari pemberdayaan:

pendapatan yang lebih kuat, UMKM yang lebih mandiri, posisi pasar yang lebih baik, dan tanggung jawab lingkungan yang lebih baik.

Tabel 3. Model Pemberdayaan Ekonomi Biru Berbasis CSR

Tahapan	Fokus Intervensi	Target / Output Utama
Tahap 1: CSR Produktif	Pelatihan, dukungan peralatan, pendampingan, dan fasilitasi bisnis.	UMKM menerima sumber daya dan pengetahuan yang mengatasi kendala produksi dan manajemen.
Tahap 2: Peningkatan Kapasitas UMKM	Keterampilan teknis, kontrol kualitas, pembukuan, literasi digital, dan penguatan kelompok.	UMKM meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan kemampuan manajerial.
Tahap 3: Legalitas dan Akses Pasar	Izin usaha, sertifikasi halal atau mutu, pengemasan, branding, pameran, dan akses lokapasar (*marketplace*).	UMKM menjadi lebih siap pasar dan dapat menjangkau pembeli yang lebih luas.
Tahap 4: Integrasi Ekonomi Biru	Pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, sanitasi, diversifikasi produk, dan kesadaran lingkungan.	UMKM mengadopsi praktik pemrosesan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Tahap 5: Ketahanan Ekonomi Pesisir	Kolaborasi multipihak, pemantauan, strategi keluar, dan kepemilikan lokal.	Masyarakat pesisir memperoleh pendapatan yang lebih kuat, ketergantungan yang lebih rendah pada bantuan, dan tanggung jawab ekosistem yang lebih baik.

Model Pemberdayaan Ekonomi Biru Berbasis CSR untuk UMKM Pengolahan Hasil Laut Pesisir

Implikasi Kebijakan dan Manajerial

Model ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, perusahaan harus merancang CSR sebagai investasi pengembangan kapasitas daripada donasi jangka pendek. Program harus memiliki target yang jelas, seperti jumlah UMKM yang memperoleh legalitas usaha, jumlah produk dengan kemasan yang lebih baik, jumlah peserta yang menggunakan pemasaran digital, dan pengurangan limbah produksi. Indikator-indikator ini membantu program CSR menjadi terukur dan akuntabel.

Kedua, pemerintah daerah harus menghubungkan program CSR dengan kebijakan pengembangan UMKM dan pesisir daerah. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menyederhanakan perizinan, menghubungkan UMKM dengan lembaga sertifikasi, menyediakan informasi pasar, dan memantau kepatuhan lingkungan. Tanpa koordinasi pemerintah, CSR dapat menjadi terfragmentasi dan gagal mendukung tujuan pembangunan pesisir yang lebih luas.

Ketiga, kelompok UMKM dan fasilitator masyarakat harus memperkuat tindakan kolektif. Pemberdayaan berbasis kelompok dapat mengurangi biaya pelatihan, meningkatkan daya tawar, dan mempermudah adopsi fasilitas bersama seperti peralatan pengeringan, alat pengemasan, penyimpanan

dingin, atau sistem pengelolaan limbah. Pendekatan ini sangat relevan untuk klaster seperti Pulau Pasaran.

Keterbatasan dan Penelitian Masa Depan

Penelitian ini dibatasi oleh desainnya yang berbasis literatur. Model yang diusulkan bersifat konseptual dan belum diuji dengan data primer dari pelaku UMKM, manajer CSR, pemerintah daerah, atau masyarakat pesisir di Lampung. Oleh karena itu, model ini harus dibaca sebagai kerangka kerja untuk desain program dan penelitian empiris di masa depan. Penelitian masa depan dapat menguji model ini melalui wawancara lapangan, survei, studi kasus, atau penelitian metode campuran di Pulau Pasaran dan wilayah pesisir lainnya di Lampung. Evaluasi dampak juga diperlukan untuk mengukur apakah program ekonomi biru berbasis CSR meningkatkan pendapatan, produktivitas, akses pasar, legalitas bisnis, pengurangan limbah, dan perilaku lingkungan di antara UMKM pengolahan hasil laut.

SIMPULAN

CSR memiliki peran strategis dalam memberdayakan UMKM pengolahan hasil laut di masyarakat pesisir Lampung ketika dirancang sebagai program yang produktif dan partisipatif, di mana integrasi ekonomi biru memperkuat agenda pemberdayaan dengan menghubungkan pengembangan bisnis dengan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, serta pelestarian laut. Model pemberdayaan ekonomi biru berbasis CSR yang diusulkan (terdiri dari CSR produktif, peningkatan kapasitas UMKM, legalitas dan akses pasar, integrasi ekonomi biru, serta ketahanan ekonomi pesisir) memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan untuk merancang program yang terukur dan berkelanjutan, namun penelitian empiris di masa depan tetap diperlukan untuk menguji efektivitas model ini menggunakan data primer guna mengevaluasi dampaknya secara langsung.

REFERENSI

Aguinis, H., dan Glavas, A. (2012). What we know and don't know about corporate social responsibility: A review and research agenda. *Journal of Management*, 38(4), 932–968.

Braun, V., dan Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.

Choudhary, P., Khade, M., Savant, S., Musale, A., Chelliah, M. S., dan Dasgupta, S. (2021). Empowering blue economy: From underrated ecosystem to sustainable industry. *Journal of Environmental Management*, 291, 112697.

Elegbede, I. O., Fakoya, K. A., Adewolu, M. A., Jolaosho, T. L., Adebayo, J. A., Oshodi, E., Hungevu, R. F., Oladosu, A. O., dan Abikoye, O. (2025). Understanding the social-ecological systems of non-state seafood sustainability scheme in the blue economy. *Environment, Development and Sustainability*, 27, 2721-2752.

Elo, S., dan Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115.

Engen, S., Hausner, V. H., Mikkelsen, E., Gundersen, H., Christie, H., Falk-Andersson, J., dan Fauchald, P. (2024). Co-creating coastal sustainability goals and indicators. *Sustainability Science*, 19, 1327-1343.

Hodgson, E. E., Essington, T. E., Samhouri, J. F., Allison, E. H., Bennett, N. J., Bostrom, A., Cullen, A. C., Kasperski, S., Levin, P. S., dan Poe, M. R. (2019). Integrated risk assessment for the blue economy. *Frontiers in Marine Science*, 6, 609.

Keen, M. R., Schwarz, A. M., dan Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the blue economy: Practical lessons from Pacific Ocean governance. *Marine Policy*, 88, 333-341.

Lee, K. H., Noh, J., dan Khim, J. S. (2020). The blue economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137, 105528.

Mareta, S., Doktoralina, C. M., dan Lestari, L. (2024). Optimizing corporate social responsibility for enhancing economic resilience in coastal communities: An inclusive development model. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(5), 5295-5300.

Mollet, J. A., Titalessy, P. B., dan Zulhendri, Z. (2024). The blue economy approach and development of marine fisheries potential in the coastal region of Jayapura City. *Society*, 12(2), 835-858.

Mukmin, N. A., dan Krisdyatmiko. (2021). Coastal community empowerment strategy through PT. Antam (Persero) Tbk UBPN Southeast Sulawesi's CSR program. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences*, 1(1), 1-9.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., dan Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13.

Rahmawati, R., dan Apip, A. (2022). Partnership model for the implementation of corporate social responsibility state own company in coastal community empowerment programs in Cilegon City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 538-543.

Rosdyanti, T., Aditi, B., Pratama, R. H., Gustinasari, E., dan Setiyarini, E. Y. (2025). The effect of human resource competency development on the productivity of salted fish UMKM centers in Pulau Pasaran Lampung. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(3), 1087-1094.

Saparuddin, S., Suwono, H., dan Prabaningtyas, S. (2025). Coastal sustainability responsibility model: A PLS-SEM analysis of knowledge, attitudes, decision-making, and behavior in Indonesian coastal communities. *Environmental and Sustainability Indicators*, 26, 101083.

Shiiba, N., Wu, H. H., Huang, M. C., dan Tanaka, H. (2022). How blue financing can sustain ocean conservation and development: A proposed conceptual framework for blue financing mechanism. *Marine Policy*, 139, 104575.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

Tasmat, D., Putranto, N. D., dan Rohim, A. (2023). Perlis Cinta Lingkungan: Empowerment strategy of PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field for coastal communities in improving the economy of Perlis Village. *INFLUENCE: International Journal of Science Review*, 5(3), 116-125.

Witoko, P., Rahayu, S., Mujahid, M., dan Lubis, M. Z. (2026). Feasibility analysis and development strategy of smoked catfish business for MSMEs in Bandar Lampung City: Analisis kelayakan dan strategi pengembangan usaha ikan lele asap pada UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 17(1), 139-150.

Xiao, Y., dan Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.

Zaini, M., Affandi, M. I., dan Haryono, D. (2023). Strategi pengembangan klaster pengolahan ikan asin Pulau Pasaran Bandar Lampung. *Journal of Food System and Agribusiness*, 7(1), 101-112.